

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA PEMUDA TANGGUH OLEH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA

POLICY IMPLEMENTATION OF PEMUDA TANGGUH SCHOLARSHIP BY CULTURE, YOUTH AND SPORTS AND TOURISM DEPARTMENT OF SURABAYA

Melinda Dwi A ¹, Prasetyo Isbandono ²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: melinda.19014@mhs.unesa.ac.id

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Beasiswa Pemuda Tangguh merupakan kebijakan yang dibuat untuk memberikan bantuan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait implementasi kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deksriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori dari Grindle dengan dua indikator implementasi yaitu isi kebijakan serta lingkungan implementasi. Pada isi kebijakan tersebut mencakup: kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Selanjutnya pada lingkungan implementasi sendiri mencakup: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian didapati bahwa faktor pendukung implementasi beasiswa Pemuda Tangguh yaitu adanya kepentingan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, tipe manfaat berupa biaya pendidikan, derajat perubahan berupa penuntasan pendidikan, pelaksana kebijakan, serta karakteristik lembaga berupa penyampaian informasi antara Pemerintah dengan penerima beasiswa. Kemudian untuk faktor penghambat tercermin dari unsur seperti pengambilan keputusan, sumber daya (manusia), kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap yang berhubungan dengan kepatuhan mahasiswa penerima beasiswa. Saran yang dapat diberikan yaitu memberikan pelatihan tambahan bagi penyelia, mengencangkan sosialisasi dalam kegiatan tambahan yang bersinergi dengan instansi lain, serta pemberian peringatan tegas kepada mahasiswa dalam memenuhi kewajiban sebagai penerima beasiswa.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan, Implementasi beasiswa

Abstract

Pemuda Tangguh Scholarship is a policy that aims to help students in Surabaya complete their education.

This research analyzes the implementation of the policy by the Department of Culture, Youth and Sports and Tourism the City of Surabaya. It identifies both supporting and inhibiting factors in the policy's implementation. The research uses a descriptive, qualitative approach and applies Grindle's theory with two implementation indicators: content of policy and context of implementation. Content of policy includes interests affected, type of benefits extent of change envisioned, site of decision making, programs implementors, and resources committed. Context of implementation includes power, interests, and strategy of actors involved, institutions and regimes characteristics, as well as compliance and responsiveness. The research shows that the policy is supported by interest in reducing poverty through education, benefits in the form of education costs, and the goal of completing education. The characteristics of the institution also facilitate information exchange between the government and scholarship recipients. However, the policy is hindered by factors such as decision-making, resources, power, interests, and strategies of actors involved, as well as compliance and responsiveness related to the fulfillment of scholarship recipient students. To improve implementation, the study suggests additional training for supervisors, intensified outreach in additional activities in synergy with other agencies, and strict warnings to students to fulfill their obligations as scholarship recipients.

Keywords: education policy, scholarship implementation

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu upaya yang direncanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pembelajaran yang berkualitas. Menurut Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak mengupayakan pengembangan diri dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, serta hak atas pendidikan dan kesempatan belajar serta berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna meningkatkan taraf hidup dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan nasional. Dari undang-undang tersebut, kita akan melihat bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting sehingga pemerintah perlu melaksanakannya secara adil. Maka dari itu upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia juga perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di setiap wilayah.

Pemerataan pendidikan menurut Dimmora (2020: 37) merupakan suatu acuan mendasar bagi kemajuan wilayah yang dilakukan dengan perbaikan pendidikan secara terus-menerus dan diharapkan menghasilkan sistem pendidikan yang baik. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan kemiskinan karena pada akhirnya menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin mempunyai lebih sedikit kesempatan untuk menerima pendidikan, dan hal ini kontraproduktif karena pendidikan dimaksudkan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Kemunculan pemerataan pendidikan tidak lain sendiri adalah karena faktor kemiskinan yang ada.

Menurut data Statistik Kesejahteraan Kota Surabaya Tahun 2016-2022 tingkat kemiskinan paling tinggi di Kota Surabaya berasal dari setingkat SD/SMP kemudian disusul oleh >SMA. Hal ini tentu menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan.

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tahun dan Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Surabaya Tahun 2016 – 2022

Tahun	<SD	Tamat SD/SMP	>SMA
2016	15,41	58,89	25,61
2017	21,66	63,59	14,75
2018	28,17	53,84	17,98
2019	19,57	50,66	29,77
2020	9,38	62,04	28,57
2021	21,40	45,36	33,24
2022	10,56	49,99	39,45

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya (2022)

Salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan adalah dengan beasiswa baik dalam tingkat pusat maupun daerah dan kepentingan itu pula yang membuat Pemerintah Daerah Kota Surabaya merancang sebuah program bantuan pendidikan serupa bernama Beasiswa Pemuda Tangguh yang berada di bawah naungan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya untuk jenjang SMA/SMK/MA, serta di bawah naungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya bagi para mahasiswa.

Beasiswa Pemuda Tangguh diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan dipilihlah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya sebagai instansi pemerintahan baru yang mengurus pemberian beasiswa tersebut untuk kelompok mahasiswa. Program ini memiliki bantuan berupa mahasiswa mendapatkan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga lulus dengan lama pendidikan S1/D4 selama 4 tahun, serta D3 selama 3 tahun. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan mendapatkan hak lain berupa bantuan uang perkuliahan sebesar Rp 750.000,00 tiap semester yang dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan kuliah serta uang saku sebesar Rp 500.000,00 yang diberikan setiap bulan melalui rekening bank masing-masing penerima beasiswa dan hak tersebut sudah tertulis jelas dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 Pasal 16.

Pada pelaksanaannya, beasiswa Pemuda Tangguh memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para calon pendaftar yang sesuai dengan Pasal 4 Perwali 135 Tahun 2022 seperti telah diterima di institusi pendidikan terkait, dalam kondisi sehat, serta berdomisili di Surabaya dibuktikan dengan KTP/KK. Pelaksanaan beasiswa Pemuda Tangguh setelah pendaftar memenuhi persyaratan adalah tahapan seleksi hingga penetapan hasil seleksi. Proses seleksi melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai instansi yang menentukan terkait standar kemiskinan/ekonomi dari penerima beasiswa, serta Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai instansi yang mampu menentukan standar nilai/kepandaian dari calon penerima beasiswa.

Gambar 1.
Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya



Sumber: Screenshot dari akun pribadi peneliti, (2023)

Pada pelaksanaannya, Beasiswa Pemuda Tangguh memiliki beberapa hal yang dikeluhkan oleh para penerimanya yaitu beberapa kali terjadinya keterlambatan pencairan uang di setiap pergantian tahun ajaran baru serta pergantian semester. Seperti yang diketahui bahwa beasiswa ini mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta uang saku bulanan, dan jika terjadi keterlambatan setiap pergantian tahun ajaran maupun semester maka akan berpengaruh pada pelunasan UKT mahasiswa karena melalui pembayaran tersebut mahasiswa baru dapat melaksanakan pemrograman mata kuliah melalui KRS. Berbanding dengan keluhan dari penerima beasiswa, pihak Disbudporapar selaku pelaksana kebijakan menyatakan bahwa salah satu persyaratan dalam pencairan uang beasiswa adalah para penerima beasiswa harus memenuhi kewajibannya seperti melengkapi dokumen kehadiran sebagai bukti mengikuti perkuliahan yang ditandatangani oleh pihak kampus, serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) uang semester. Dokumen inilah yang menjadi kewajiban mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan beasiswa dengan baik dan tetap datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan.

Berdasarkan uraian hambatan tersebut maka peneliti melakukan penelitian analisis implementasi kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait implementasi kebijakan pemberian Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Metode

Penelitian tentang implementasi Beasiswa Pemuda Tangguh dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penelitian kualitatif ditandai dengan sifatnya yang lebih deskriptif dan peneliti langsung menuju sumber data sebelum mengubahnya menjadi kata-kata atau gambar. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan mendapatkan fakta yang terjadi dengan adanya pengamatan terkait dengan implementasi Beasiswa Pemuda Tangguh. Kemudian penelitian ini memiliki fokus penelitian sebagai batasan pada aspek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan fokus implementasi kebijakan berdasarkan teori Merilee S. Grindle dengan dua indikator besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) mencakup kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya, serta pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer yaitu wawancara dari pelaksana kebijakan Pemuda Tangguh yaitu pada pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata bidang Kepemudaan yang diwakili oleh Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda, kemudian beberapa orang penyelia/staff yang bertugas untuk masing-masing universitas, serta dari sasaran kebijakan yaitu penerima beasiswa yang diwakili oleh para koordinator dari setiap universitas. Selain itu, metode pengumpulan data sekunder didapatkan dari jurnal penelitian, dokumen dari instansi terkait, berita online yang berhubungan dengan program Beasiswa Pemuda Tangguh, serta literatur lainnya yang relevan seperti artikel.

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *nonprobability purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan yang hanya memilih orang-orang yang dianggap layak untuk berpartisipasi dalam studi penelitian, dan dalam penelitian ini kriteria layak tersebut didasarkan atas keterlibatan langsung sampel dengan topik penelitian. Teknik tersebut dipilih dengan alasan tidak mungkin melibatkan semua pihak yang terkait terutama penerima beasiswa dengan jumlah sebanyak itu untuk diwawancara, sehingga sampel hanya dipilih dari koordinator yang menjadi perwakilan penerima beasiswa dan begitu pula dengan sampel dari pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di bidang Kepemudaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) menuliskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara interaktif dengan intensitas terus-menerus hingga data telah dianggap tuntas dan jenuh, artinya bahwa ketika peneliti telah berada di lapangan maka wawancara harus dilakukan secara menyeluruh hingga tidak ada lagi data yang terlewat dengan tahapan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada akhir penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Surabaya memiliki kesadaran bahwa tingkat pendidikan memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut dari kesadaran itu, Pemerintah Kota Surabaya mulai menyusun kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung hal tersebut. Adanya kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 menjadi salah satu solusi dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Melalui kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh diharapkan dapat memotivasi putra/putri Kota Surabaya untuk tidak perlu mencemaskan biaya pendidikan sehingga mereka senantiasa memiliki semangat dalam menyelesaikan pendidikannya.

Guna mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut, peneliti menggunakan indikator implementasi dari Grindle berupa isi kebijakan (*content of policy*) mencakup kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya, serta pada lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang Memengaruhi (*interest affected*)

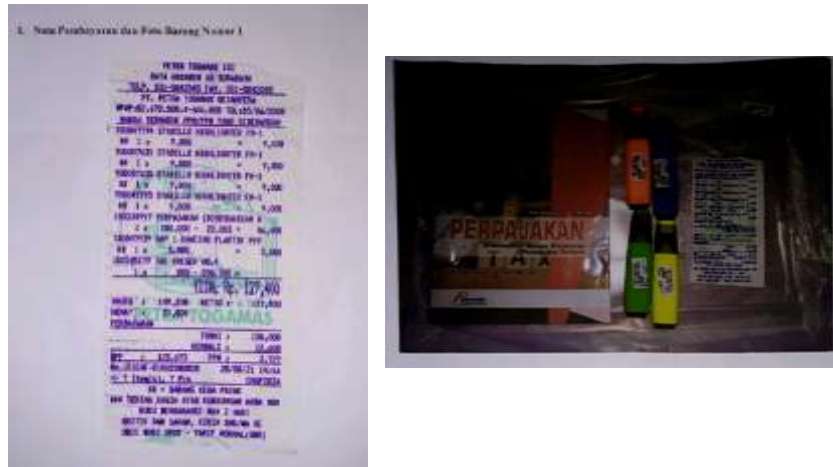
Terbagi menjadi kepentingan dari pelaksana maupun penerima. Kepentingan tersebut menjadi saling berhubungan karena pihak Disbudporapar sebagai pelaksana kebijakan dapat melaksanakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan jangka panjang melalui kesempatan pendidikan dan mahasiswa sebagai sasaran kebijakan juga telah menerima bantuan dengan adanya beasiswa. Maka dari itu, upaya pemberian kesempatan pendidikan dilakukan secara berkelanjutan. Kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dinilai dapat membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan (Herlina, 2019). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Zulyanto (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinan dan adanya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian pendidikan akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*)

b. Tipe Manfaat yang Diperoleh (*type of benefits*)

Pemberian beasiswa tersebut adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan serta penunjang pendidikan kepada mahasiswa/pemuda yang memiliki prestasi. Kemudian secara tujuan beasiswa ini dapat menjadi sebuah penjamin tentang keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu, dan hal ini adalah satu aspek penting dalam pengimplementasian kebijakan karena memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan itu sendiri. Kebermanfaatan kebijakan dinilai sebagai salah satu hasil dari penyusun kebijakan yang mampu untuk memilih kebijakan mana sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat (Aslinda, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Harmani (2020) bahwasanya salah satu aspek yang menjadi bukti bahwa kebijakan itu efektif atau tidaknya adalah dari

seberapa besar masyarakat dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut.

Gambar 2.
Penggunaan Beasiswa pada Kebutuhan Perkuliahan



Sumber: Screenshot dari koordinator, (2023)

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan (*extent of change envisioned*)

Derajat perubahan yang diinginkan yaitu bahwa adanya harapan yang besar kepada para penerima beasiswa bahwa setelah lulus nantinya dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tersebut sedikit banyak akan turut mengangkat derajat keluarga dari segi ekonomi, dan hal tersebut dapat mendukung program Pemerintah lainnya dalam angka mengentaskan kemiskinan dari keluarga ekonomi menengah. Penerima manfaat kebijakan dapat sangat dipengaruhi oleh jenis kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan menurut Khusufmawati (2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan Beasiswa Pemuda Tangguh yang memberikan bantuan dan memiliki harapan yang besar terhadap sasaran kebijakan agar mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan secara berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan Kinanti (2022) yang menegaskan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan publik tentunya selalu menghendaki adanya perubahan dari setiap penerapan kebijakan publik dan alasan tersebut tidak lain adalah karena dalam perubahan yang ingin dicapai pasti ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai perubahan.

d. Pengambilan Keputusan (*site of decision making*)

Pada beberapa permasalahan yang terjadi pengambilan keputusan oleh Disbudporapar masih melibatkan bantuan instansi lain yang juga memiliki keterlibatan dengan implementasi Beasiswa Pemuda Tangguh. Pengambilan keputusan dalam kebijakan memiliki kedudukan penting karena sebagai penentu dari segala permasalahan yang kapan saja terjadi, sekaligus sebagai penentuan apakah kebijakan yang diimplementasikan tersebut sudah tepat atau masih perlu untuk diperbaiki kembali (Fajarwati, 2022). Disbudporapar sejauh ini lebih banyak mampu untuk menyelesaikan permasalahan dan diharapkan dapat mempertahankan kebaikan

yang ada. Ini juga sejalan dengan penelitian Pasolong (2023) mengatakan bahwa di setiap pengambilan keputusan dapat memiliki kemungkinan efek baik atau buruk, maka dari itu penting adanya di setiap pengambilan keputusan harus mampu untuk lebih banyak membawa kebaikan dan meminimalisir risiko yang muncul.

e. Pelaksana Program (*Program Implementors*)

Implementasi Beasiswa Pemuda Tangguh juga memiliki keterkaitan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal ini meskipun berbeda instansi dengan Disbudporapar namun masih sesama lingkup Pemerintah Kota Surabaya. Pihak-pihak yang terlibat ini memiliki kewenangan serta tugas masing-masing dan saling bersinergi. Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh merupakan kebijakan jangka panjang yang keberhasilannya akan berkelanjutan sehingga kerja sama antar beberapa pihak dirasa memang sangat penting untuk pencapaian tujuan kebijakan. Pada kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendidikan akan berjalan maksimal apabila setiap pihak mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan mampu menjaga kerja sama yang kuat antar karakteristik yang terlibat. *Stakeholders* dalam kebijakan berorientasi pendidikan yang dimaksud adalah pemerintah sebagai otoritas tertinggi, masyarakat sebagai sasaran kebijakan, serta pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana (Damayanti, 2019). Sinergi antar instansi ini juga sejalan dengan penelitian dari Kariem (2020) menyatakan bahwa hierarki dalam pemerintahan dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa yang menjadi bagian instansi pemerintahan harus mampu memperkuat koordinasi lintas sektor agar tercipta sistem pemerintahan yang efektif.

f. Sumber Daya yang Digunakan (*resources committed*)

Sumber daya utama yaitu anggaran dalam Beasiswa Pemuda Tangguh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber daya manusia yaitu penyelia pada Beasiswa Pemuda Tangguh tidak dibekali dengan semacam pelatihan karena pemilihannya hanya mengikuti ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kepemudaan, dan dengan tidak adanya pelatihan khusus tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan. Gopay (2021) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia, dan sangatlah berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya keluhan dari penerima beasiswa terkait informasi pelaksanaan beberapa kegiatan wajib ataupun tambahan dalam beasiswa. Ini sejalan dengan pendapat dari Lengkoan (2022) yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya aspek rekrutmen sumber daya manusia namun jika tidak diimbangi dengan pelatihan ataupun bimbingan teknis terkait peningkatan keterampilan serta pengetahuan maka kualitas sumber daya manusia tersebut masih akan selalu memerlukan perbaikan.

2. Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*)

Strategi pada aspek ini terkait dengan sosialisasi. Sosial media dipilih sebagai cara sosialisasi karena dinilai lebih efektif dan mampu menarik banyak calon pendaftar. Sosialisasi yang dilakukan berupa menyebarkan flyer/pamflet melalui Instagram, *website*, dan grup WhatsApp dari penerima sebelumnya. Penyebaran informasi melalui grup WhatsApp juga terbilang cepat karena para penerima sebelumnya akan menyebarkan pula kepada teman-teman yang lain sehingga informasi tersebar luas. Ini sejalan dengan pendapat Suryani dalam Siregar (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial sudah menjadi pendukung segala kegiatan seperti bisnis, dan memanfaatkan media sosial dapat mempermudah ataupun menguatkan fungsi komunikasi dari pihak yang berkepentingan terhadap masyarakat/publik. Bagi penerima beasiswa, ASBAS merupakan kegiatan wajib tambahan atas perintah dari Disbudporapar berupa memberikan ilmu pengajaran kepada anak-anak usia sekolah secara sukarela di setiap Rukun Warga (RW). Hal ini ternyata menjadi kendala karena mahasiswa dalam pelaksanaan ASBAS masih tidak memahami dengan jelas apa saja yang harus mereka lakukan, terlebih lagi tidak semua mahasiswa berasal dari rumpun ilmu pendidikan. Mahasiswa melalui koordinator juga sudah sering menanyakan kendala tersebut atau memohon sosialisasi baik kepada Disbudporapar maupun Dispendik, namun seringkali butuh waktu lama untuk ditanggapi. Nugroho dalam Mawaza (2020) mengatakan bahwa menurut asumsi teori elit kekuasaan politik memiliki kepentingan sebagai pengatur dan penyelenggara kebijakan publik serta kebijakan yang telah disusun maka langkah selanjutnya adalah mengomunikasikannya kepada masyarakat, dan dalam hal ASBAS tidak ada komunikasi yang jelas sehingga mahasiswa mengalami kebingungan. Ini juga sejalan dengan sosialisasi menurut Sriganda (2020) sangat diperlukan karena sebagai pembagi pengetahuan atau *transfer knowledge*, yang artinya bahwa sosialisasi mengandung makna sebagai proses memahami hal baru agar dapat dikenali dengan baik.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*institution and regime characteristic*)

Wadah bagi penerima beasiswa untuk menyampaikan masalahnya adalah melalui koordinator, karena salah satu tugas koordinator adalah menyampaikan permasalahan apa yang sedang dialami oleh penerima beasiswa sehingga dalam hal ini karakteristik Disbudporapar dapat disimpulkan sebagai lembaga yang mau memberikan kesempatan kepada sasaran kebijakan berbicara asalkan mereka memahami poin-poin dari permasalahan tersebut.

Sikap Disbudporapar tersebutlah yang dapat dimaknai sebagai karakteristik lembaga serta rezim yang berkuasa, yang dalam hal ini didukung dengan pendapat dari Saputra (2023) yang menjelaskan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa juga dapat dimaknai sebagai sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi hingga menerima adanya masukan sehingga mampu menanggapi dengan baik dan memperlancar implementasi kebijakan. Karakteristik pelaksana kebijakan sangatlah penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk juga dalam kebijakan Pemuda Tangguh karena hal tersebut adalah cerminan dari bagaimana

pihak pelaksana menghadapi adanya masalah dan bagaimana solusi yang diambil apakah mampu menjawab masalah yang ada atau justru akan menghambat implementasi kebijakan. Ini sejalan dengan pendapat dari Supratiwi (2023) karena menurut kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila mendapatkan dukungan dari rezim yang memiliki kuasa dan dukungan tersebut berupa karakteristik yang baik dari lembaga yang bersangkutan.

c. Karakteristik dan Daya Tanggap (*compliance and responsiveness*)

Kepatuhan penerima beasiswa yang masih rendah terhadap kewajiban. Kepatuhan tersebut adalah pada aspek SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) serta presensi bulanan yang kerap diselesaikan penerima beasiswa tidak tepat waktu. Ketidaktepatan tersebut dikarenakan presensi membutuhkan tanda tangan dosen atau stempel universitas dan itu memakan waktu lama, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap waktu pengumpulan presensi. Padahal presensi bulanan memiliki fungsi utama sebagai bukti mahasiswa mengikuti perkuliahan selama satu bulan itu dan sebagai persyaratan untuk pencairan uang saku bulanan. Mahasiswa yang mengumpulkan terakhir akan mengganggu kelancaran pencairan secara keseluruhan di satu universitas, karena Disbudporapar akan memproses kelengkapan dokumen tersebut secara bersama-sama. Kepatuhan menurut Effendy dalam Mulia (2022) dituliskan sebagai faktor yang memperlancar kebijakan yang sedang diimplementasikan itu sendiri sehingga tujuan awal dari adanya kebijakan publik dapat dicapai dengan akuntabilitas yang jelas, dan dengan kepatuhan yang masih rendah dari penerima beasiswa maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja Disbudporapar. Daya tanggap Disbudporapar terhadap kepatuhan mahasiswa juga masih perlu diperbaiki karena hal tersebut masih sering terjadi, karena daya tanggap menurut Prasetyo (2022) dimaknai sebagai sejauh apa kecepatan pemerintah untuk menanggapi adanya keluhan dari masyarakat terkait kendala yang sedang dihadapi, termasuk kendala dalam implementasi kebijakan publik dan tanggapan tersebut sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat pula.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait implementasi kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh dapat diambil kesimpulan telah berjalan dengan baik dengan memenuhi beberapa indikator implementasi kebijakan

1. Kepentingan yang memengaruhi kebijakan Pemuda Tangguh yaitu memberikan kesempatan pendidikan dengan beasiswa bagi mahasiswa dan ini sudah terpenuhi.
2. Tipe manfaat dari adanya kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh yaitu bagi sasaran kebijakan mendapatkan dukungan biaya Pendidikan dan ini juga sudah terpenuhi.
3. Perubahan yang diinginkan melalui Beasiswa Pemuda Tangguh diharapkan dapat menjadi sebuah pembiayaan mahasiswa ketika sudah lulus dan mendapatkan ilmu perkuliahan nantinya mereka mampu untuk bekerja dengan layak sehingga dapat mengangkat derajat keluarga agar tidak terus-menerus berada dalam kategori kemiskinan.
4. Pengambilan keputusan pada beberapa kendala yang pernah terjadi masih harus melibatkan instansi lain karena pada dasarnya peraturan yang digunakan oleh Disbudporapar masih memiliki batasan baik dari segi poin maupun wewenang.

5. Pelaksana Beasiswa Pemuda Tangguh secara pengelolaan berada dalam kendali Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya namun masih melibatkan instansi terkait. Instansi tersebut yaitu Dinas Pendidikan sebagai penentu standar akademik serta Dinas Sosial sebagai penentu standar kemiskinan.
6. Sumber daya secara anggaran Beasiswa Pemuda Tangguh bersumber dari dana APBD sedangkan sumber daya manusia yaitu penyelia secara kompetensi tidak pernah diberikan pelatihan sebelumnya. Adapun saran dari faktor penghambat ini yaitu tidak ada salahnya untuk memberikan program pelatihan kepada penyelia agar kemampuan penyelia tersebut semakin berkembang.
7. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat terkait pelaksanaan sosialisasi pembukaan beasiswa dilakukan di sosial media dan hasilnya bagus karena mampu menarik para penerima beasiswa, namun yang masih kurang adalah sosialisasi pada kegiatan wajib tambahan untuk para penerima beasiswa yaitu dalam program ASBAS karena kurangnya pembekalan untuk penerima beasiswa dalam program tersebut. Adapun saran dari faktor penghambat ini perlu bagi Disbudporapar untuk sering berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kejelasan informasi serta petunjuk teknis kegiatan melalui adanya sosialisasi.
8. Karakteristik lembaga yaitu Disbudporapar sebagai instansi pelaksana kebijakan selalu berusaha untuk memberikan kesempatan bagi penerima beasiswa yang diwakili oleh para koordinator untuk menyampaikan keluhannya ketika memang dirasa terjadi permasalahan dalam Beasiswa Pemuda Tangguh.
9. Kepatuhan dan daya tanggap mahasiswa sebagai sasaran kebijakan dalam beasiswa ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi karena seringkali terlambat dalam memenuhi kewajiban penerima beasiswa seperti presensi bulanan serta SPJ semester yang berdampak terhadap pencairan uang saku. Adapun saran dari faktor penghambat ini yaitu lebih sering mengingatkan mahasiswa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan SPK yang telah disepakati ketika awal penerimaan serta menegaskan kepada mahasiswa apabila masih saja tidak patuh maka dapat dikirimkan surat peringatan hingga peringatan lain yang lebih tegas. Selain itu perlu juga untuk mengevaluasi ulang terkait bagian mana saja yang paling sering menjadi masalah bagi mahasiswa agar tidak selalu terulang ke depannya.

Referensi

- Alaslan, A. (2021). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi Relokasi Pasar*. CV. PENA PERSADA.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. K-Media.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

- Mala, Rika. (2020). Efektivitas Program Pemerintah Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu Dalam Kebijakan Nomor 18 Tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bosowa. Makassar.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>.
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020.
- Rohmah, E. N. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 85-104
- Sujana, I. W. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*. 29-39
- Thahirah, Mutia. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau. Riau
- Utami, Y. P. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA DAERAH UNTUK MAHASISWA KABUPATEN LAMANDAU. *Politik Dan Pemerintahan*, 10.
- Wulandari, Shavira Ayu. (2020). Pengaruh Implementasi Program Beasiswa Generasi Emas Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.